# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam proses pembangunan yang sedang dijalani bangsa Indonesia saat ini, diperlukan kemampuan serta dukungan dari semua faktor. Salah satu faktor yang terpenting agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar adalah tersedianya dana yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan. Salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan tersebut yaitu dari sektor pajak sebagai penerimaan kas negara. Pajak dipandang sebagai bagian yang penting dalam penerimaan negara. Jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata berasal dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Peran perpajakan sangat penting sebagai sumber biaya penyelenggaraan pemerintahan, selain itu pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan nasional ke arah masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk itu, diperlukan peran masyarakat yang diwujudkan dalam kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Mekanisme tadi tidak akan berjalan lancar apabila tidak ada pemerintahan. Pelayanan yang diberikan pemerintah merupakan suatu kepentingan umum untuk kepuasan bersama sehingga pajak yang mengalir dari masyarakat akhirnya kembali lagi ke masyarakat. Undang-undang

perpajakan yang sekarang berlaku di Indonesia menganut Self Asessment System, yang maksudnya masyarakat diberi kepercayaan penuh melaksanakan kewajiban perpajakan. Pajak penghasilan merupakan bagian pajak negara yang ditetapkan oleh pemerintah. Pajak penghasilan yang diatur di dalam Undang-undang No.7 Tahun 1983 kemudian diubah dengan UU No.17 Tahun 1991 dan diubah lagi dengan UU No.10 Tahun 1994, tarakhir diubah dengan UU No.17 Tahun 2000, termasuk di dalamnya PPh pasal 21.

Pajak penghasilan merupakan bagian dari pemasukan pajak termasuk pajak yang terbesar karena menyangkut penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dari berbagai pajak penghasilan yang ada di Indonesia yang mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan bagian dari pajak yang pendapatannya untuk menambah kas negara. PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Ada pun perhitungan PPh pasal 21 yaitu Penghasilan Kena Pajak dihitung dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun termasuk iuran Tabungan Hari Tua/Tunjangan Hari Tua (THT) (kecuali iuran Tabungan Hari Tua/THT pegawai negeri sipil/anggota ABRI/pejabat negara), dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Yang termasuk di dalam PPh pasal 21 ini adalah ketika pendapatannya sudah melebihi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Apabila seorang wajib pajak telah

memenuhi kriteria tersebut, maka wajib dilakukan pemotongan untuk pajak atas penghasilan yang diterima orang pribadi tersebut. Orang pribadi yang penghasilannya kurang dari yang telah ditentukan oleh pemerintah pun dikenakan pajak tetapi pajaknya ditanggung oleh pemerintah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis menyadari bahwa perhitungan Pajak Penghasilan dalam bidang Perpajakan merupakan hal yang sangat vital dalam kelangsungan operasional Perpajakan. Oleh karena itu, penulis tertarik mengambil judul Laporan Kerja Praktek berikut **"Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying".**

## 1.2 Tujuan Kerja Praktek

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam kerja praktek ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dokumen – dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.
2. Untuk mengetahui prosedur yang terkait atas perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.

## 1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan antara lain bagi :

1. Penulis
   a. Menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa/i berkaitan dengan Prosedur perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21.
   b. Untuk mengetahui dan membandingkan antara teori yang didapat di bangku kuliah dengan praktek kerja di lapangan berkaitan dengan prosedur perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21.
   c. Untuk memahami dan mempelajari prosedur perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21.
2. Instansi

   Dapat memberikan sumbangan pikiran khusunya dalam perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21.
3. Pihak lain

   Dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi pembaca mengenai prosedur perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 serta dijadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

## 1.4 Metode Kerja Praktek

Menurut Sugiyono (2003:1) menyatakan bahwa :

“Metode penelitian pada dasarnya merupakan sara ilmiah untuk mendapatkan data

dengan tujuan dan kegunaan tertentu".

Cara ilmiah disini berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri- ciri keilmuan dengan rasional, empiris dan sistematik. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara – cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berrarti cara – cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara – cara yang digunakan. Sedangkan sistematis artinya proses yang digunakan penelitian itu menggunakan langkah – langkah yang bersifat logis.

Metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian deskriptif, yaitu suatu cara penelitian dengan menggambarkan dan menguraikan secara jelas mengenai objek yang diteliti.

Menurut Soegiyono (2003:11) menyatakan bahwa :

"Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang silakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lain".

Metode ini pun dapat dilakukan sebagai suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian berlangsung.

### 1.4.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dan keterangan – keterangan lainnya dalam penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Studi Lapangan *(Field research)*

   Yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara mengadakan penelitian secara langsung ke objek yang dituju yaitu KPP Pratama Bandung Cibeunying.

   a. Wawancara (*Interview*)

      Yaitu pengumpulan data – data dengan cara mewawancarai/mengajukan pertanyaan kepada pembimbing dan staf pegawai bagian keuangan tentang bahan penelitian.

   b. Observasi (*Observastion*)

      Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan atau ke perusahaan dan melihat secara langsung pekerjaan yang dilakukan untuk dibuat kesimpulan.

   c. Dokumentasi (*Documentation*)

      Yaitu mengumpulkan bahan tertulis berupa data – data yang diperoleh dari bagian – bagian yang terkait.

2. Studi Pustaka (*Library Reseach*)

   Yaitu pengumpulan data – data dari literature, dari sumber – sumber lain yang berhubungan dengan masalah, membaca dan mempelajari buku – buku untuk memperoleh data – data yang berkaitan.

### 1.4.2 Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, diinterprestasikan untuk menyederhanakan data penelitian yang sangat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana dan lebih mudah untuk dipahami.

Untuk mencapai suatu kesimpulan atas data yang berhasil dikumpulkan dan lianalisis, maka proses yang akan dilakukan adalah menyusun criteria yang didasarkan pada data yang dikumpulkan baik hasil penelitian kepustakaan maupun dari gambaran umum perusahaan yang dijadikan objek penelitian.

Setelah data yang diperlukan terkumpul dan dirasakan cukup untuk menyusun laporan ini, maka penulis melaksanakan  proses pengolah an data secara manual, meliputi :

1. Melakukan tinjauan terhadap dokumen – dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21.
2. Melakukan tinjauan terhadap jaringan prosedur dalam pelaksanaan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21.

## 1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Peneliti melakukan kerja praktek di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying yang berlokasi di Jalan Purnawarman No 21 Bandung - Jawa Barat.

Adapun waktu kerja praktek ini dimulai pada tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan 26 Agustus 2010.

**Tabel 1.1**

**Aktivitas Kerja Praktek**

| No | Aktivitas | Hari | Waktu |
|---|---|---|---|
| 1 | Kerja Praktek | Senin - Jum'at | 07.30 - 17.00 |
| 2 | Istirahat | Senin - Juum'at | 12.00 – 13.00 |
| 3 | Libur | Sabtu - Minggu | - |

Adapun aktivitas Kantor di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**

**Aktivitas Kantor**

| No | Aktivitas | Hari | Waktu |
|---|---|---|---|
| 1 | Kantor | Senin s/d Jum'at | 07.30 – 17.00 |
| 2 | Istirahat | Senin –Jum'at | 12.00 -13.00 |
| 3 | Libur | Sabtu s/d Minggu | - |

**Tabel 1.3**

**Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek**

| NO | | KEGIATAN KP | BULAN & TAHUN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | JUNI '10 | JULI '10 | AGT '10 | SEPT '10 | OKT '10 | NOV '10 | DES '10 |
| I | | **Persiapan KP** | | | | | | | |
| | 1 | Permohonan Ijin Kp | ■ | | | | | | |
| | 2 | Realisasi Ijin KP | ■ | | | | | | |
| | 3 | Menentukan Tempat Kp | | ■ | | | | | |
| | 4 | Mendapat surat penerimaan | | ■ | | | | | |
| | 5 | Mendapat Absen | | ■ | | | | | |
| II | | **Pelaksanaan** | | | | | | | |
| | 1 | Aktivitas KP | | ■ | ■ | | | | |
| | 2 | Bimbingan di tempat KP | | ■ | ■ | | | | |
| III | | **Pelaporan KP** | | | | | | | |
| | 1 | Konsultasi | | | | ■ | ■ | | |
| | 2 | Mulai Bimbingan | | | | | ■ | | |
| | 3 | Pembuatan Laporan | | | | | ■ | ■ | |
| | 4 | Ujian KP | | | | | | | ■ |
| | 5 | Selesai Pelaporan | | | | | | | ■ |